

## Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi dengan Model Pembelajaran Diskusi Kelas

Tukiran<sup>1</sup>, Wildan Nurul Fajar<sup>2</sup>, Muhammad Abduh<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pos-el: wildannurulfajar.wnf@gmail.com

### Abstrak

Tindakan anarkis oleh sebagian pendukung karena kekalahan jago yang diusung dalam pilkades dan atau pilkada dewasa ini semakin sering terjadi. Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia belakangan ini, sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elit politik yang tidak kunjung terselesaikan. Cara paling strategis untuk “mengalami demokrasi” dan menjadi *civilized* adalah melalui “pendidikan kewargaan”. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi dengan model pembelajaran diskusi kelas. Merupakan penelitian tindakan kelas pada mahasiswa semester II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang terdiri dari dua siklus. Pengumpulan data dengan kuisioner, observasi. Analisis data dengan presentase. Hasil analisis rata-rata angket sikap demokratis mahasiswa semester II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada pretest 42%, siklus I 88 %, dan siklus II: 91,95%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran diskusi kelas dapat mengembangkan nilai-nilai demokrasi mahasiswa.

**Kata kunci:** Nilai demokrasi, pendidikan demokrasi, diskusi kelas

### Pendahuluan

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2002:xvii), berpendapat bahwa *Civic Education* merupakan salah satu upaya pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan seseorang menjadi warganegara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu fokus utama pencapaian tujuan pembelajaran PKn yang dikembangkan dalam PKn adalah terbentuknya perilaku (sikap).

Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia belakangan ini, sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elit politik yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Jika salah satu esensi demokrasi dan politik adalah “*art of compromise*” dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap “*pokoknya*” pada kalangan elit politik dan massa. Lebih celaka lagi sikap-sikap seperti itu kemudian diberi legitimasi keagamaan dan teologis oleh kalangan ulama, sehingga potensi kekerasan yang mengancam demokrasi semakin menguat lagi (Azra, 2002:8-9). Menciptakan kultur demokrasi bukan saja tidak mudah, melainkan juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Bagi bangsa Indonesia yang baru memulai demokrasi dalam usia *seumur jagung* memang menjadi persoalan tersendiri terutama berkaitan dengan kesiapan masyarakat menjalankan praktek demokrasi.

Bahwa cara paling strategis untuk “mengalami demokrasi” dan menjadi *civilized* adalah melalui

“pendidikan kewargaan”. Di dalam pendidikan kewargaan terkandung makna sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktek demokrasi dan keadaban. Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewargaan antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya, harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan (Cipto at al, 2002:i).

Semua perkembangan ini jelas tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi. Sebagaimana dikemukakan Sorensen (dalam Azra, 2000:v), bahwa konflik domestik yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan kekuasaan, dan pada gilirannya diikuti dengan kekerasan dan anarki, sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik demokratis. Apalagi untuk menumbuhkan keadaban demokratis.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat disusun perumusan masalah “Apakah nilai-nilai Demokrasi dapat dikembangkan dengan model pembelajaran *Diskusi Kelas* pada pokok bahasan Transformasi Nilai-nilai Demokrasi mahasiswa semester II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Semester Genap tahun akademik 2012-2013.

Tujuan penelitian untuk mengembangkan nilai-nilai Demokrasi dengan model pembelajaran *Diskusi Kelas* pada pokok bahasan Transformasi Nilai-nilai Demok-

rasi mahasiswa PGSD kelas IB FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto Semester Genap tahun akademk 2012-2013.

### Nilai-nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi menurut Cipto, et al (2002: 31-37) meliputi:

#### 1. Kebebasan Menyatakan Pendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warganegara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi (Dahl, 1971). Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warganegara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. Dalam masa transisi menuju demokrasi saat ini perubahan-perubahan lingkungan politik sosial, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi sering kali menimbulkan persoalan bagi warga negara maupun masyarakat pada umumnya. Jika persoalan tersebut sangat merugikan hak-haknya selaku warga negara atau warga negara berharap agar kepentingannya dipenuhi oleh negara, dengan sendirinya warga negara berhak untuk menyampaikan keluhan tersebut secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah.

#### 2. Kebebasan Berkelompok

Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari.

Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok termasuk membentuk partai baru maupun mendukung partai apa pun. Tidak ada lagi keharusan mengikuti ajakan dan intimidasi pemerintah. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih sehat bagi warga negara. Itu semua karena jaminan bahwa demokrasi mendukung kebebasan kelompok.

#### 3. Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada empat jenis partisipasi. *Pertama*, adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR/DPRD maupun pemilihan Presiden. Di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia pemberian suara sering dipersepsikan sebagai wujud kebebasan berpartisipasi politik yang paling utama. Pada umumnya negara demokrasi yang baru berkembang senantiasa mengharapkan agar jumlah pemilih atau partisipan dalam pemberian suara dapat mencapai suara sebanyak-banyaknya. Dalam demokrasi sebenarnya

tidak ada keharusan untuk memberikan suara dengan cara-cara kekerasan.

*Kedua*, adalah bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah. Bentuk partisipasi yang kedua ini belum berkembang luas di negara demokrasi baru. Kontak langsung dengan pejabat pemerintah ini akan semakin dibutuhkan karena kegiatan pemberian suara secara reguler (pemilihan anggota DPR/Presiden) dalam perkembangannya tidak akan memberikan kepuasan bagi masyarakat.

*Ketiga*, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Ini diperlukan oleh negara demokrasi agar sistem politik bekerja lebih baik. Pernyataan protes terhadap kebijakan divestasi bank, privatisasi BUMN, kenaikan harga tarif listrik, telepon dan harga BBM adalah bagian dari proses demokrasi sejauh itu diarahkan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah atau swasta dan tidak untuk menciptakan gangguan bagi kehidupan politik.

*Keempat*, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari lurah, bupati, walikota, gubernur, anggota DPR/DPRD hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku.

#### 4. Kesetaraan antar Warga

Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sisi lain diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multietnis, multibahasa, multidaerah, dan multiagama. Heterogenitas masyarakat Indonesia seringkali mengundang masalah khususnya bila terjadi miskomunikasi antarkelompok yang kemudian berkembang luas menjadi konflik antarkelompok.

#### 5. Rasa Percaya (*Trust*)

Jika rasa percaya tidak ada maka besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan menjalankan agendanya karena lemahnya dukungan sebagai akibat dari kelangkaan rasa percaya. Dalam kondisi seperti ini pemerintah bahkan bisa terguling dengan mudah sebelum waktunya sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin lambat. Konsekuensi dari kebutuhan akan rasa percaya ini masing-masing politisi juga harus mengembangkan rasa percaya terhadap politisi yang lain sehingga timbul hubungan yang didasarkan pada rasa percaya satu sama lain. Bahkan, agar pemerintah dipercaya maka iapun harus mampu menumbuhkan rasa percaya pada dirinya sehingga tumbuh pula rasa percaya dari masyarakat luas terhadap pemerintah.

## 6. Kerja sama

Kerja sama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerja sama yang dimaksud di sini adalah kerja sama dalam hal kebajikan. Sebagaimana perintah Allah SWT: *"Hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan bakti, dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan"* (QS Al-Maidah: 2, A. Hassan, 1956:208).

### Pengembangan Sikap Demokratis Mahasiswa

Pendidikan demokratis menurut Zamroni (2001: 8) adalah mendidik warga masyarakat agar gampang dipimpin tetapi sulit dipaksa, gampang diperintah tetapi sulit diperbudak. Sebagai warga dari masyarakat demokratis, masing-masing warga dengan suka-rela senantiasa taat pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Namun apabila undang-undang atau peraturan dilecehkan, mereka akan bangkit. Apalagi, kalau mereka dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Demikian pula reaksi spontan warga masyarakat akan muncul apabila justru penguasa sendiri yang dengan sengaja dan sadar melecehkan undang-undang atau peraturan yang ada.

### Metode Pembelajaran Diskusi Kelas

Metode diskusi baru dapat berjalan dengan baik bila mahasiswa telah memiliki pengalaman atau konsep dasar tentang masalah yang akan didiskusikan. Maka metode ceramah dapat dimanfaatkan untuk menerangkan teori atau konsep sebelum diskusi dilaksanakan.

Urutan metode tidaklah harus ceramah baru diskusi. Hal ini dapat dilaksanakan secara fleksibel. Dosen dapat meminta mahasiswa secara kelompok mendiskusikan suatu masalah menurut pengetahuan dan pengalaman mereka. Hasil diskusi dibahas melalui ceramah dosen dan dikaitkan dengan konsep yang akan dikaji. Cara ini memungkinkan dosen untuk memulai pengajaran dari pengetahuan yang telah dimiliki mahasiswa sehingga konsep baru menjadi lebih mudah dipelajari dan bermakna bagi mahasiswa.

### Manfaat Metode Diskusi

Diskusi tepat untuk (1) diberikan bila mahasiswa telah memiliki konsep atau pengalaman terhadap bahan yang akan didiskusikan, oleh karena itu sebelum diskusi dosen hendaknya telah memberikan penjelasan tentang bahan yang akan didiskusikan (2) memperdalam pengetahuan yang telah dikuasai oleh mahasiswa (3) melatih mahasiswa mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan; (4) melatih mahasiswa menghadapi masalah secara berkelompok, berpikir bersama memecahkan masalah yang mereka hadapi.

## Langkah-langkah Memimpin Diskusi

### Persiapan

Persiapan metode diskusi meliputi (1) merumuskan tujuan instruksional, mengapa atau alasan harus diadakan diskusi, (2) menjelaskan pentingnya diadakan diskusi kelas (3) menjelaskan hasil yang akan dicapai dari diskusi kelas (4) menjelaskan tugas masing-masing kelompok. (4) merumuskan pokok pembicaraan dengan jelas dan ringkas (5) memper-timbangkan latar belakang konsep dan pengalaman yang telah dimiliki mahasiswa (5) menyiapkan kerangka diskusi secara terperinci (6) menyiapkan fasilitas (7) pembagian kelompok; (8) mendesain ruangan agar semua peserta diskusi maupun penyaji dapat berhadapan, sehingga lebih komunikatif dan inter-aktif.

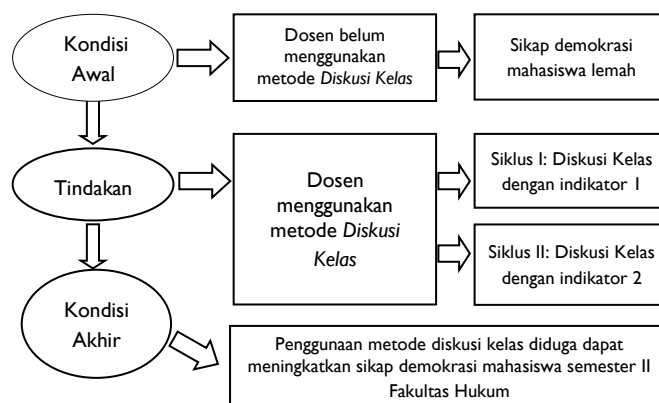
### Pelaksanaan

Pelaksanaan metode diskusi kelompok (a) dosen menginformasikan tujuan instruksional, mengkomunikasikan pokok masalah, menerangkan prosedur diskusi (presentasi, tanya jawab/diskusi, alokasi waktu, menjelaskan aturan main) (b) kelompok penyaji menyajikan makalah, secara bergantian secara panel, paling lama 15 menit tiap kelompok; (c) diskusi panel, moderator (sementara dosen) memberikan kesempatan bertanya kepada audien per termin, (d) pemberian kesempatan kepada kelompok penyaji untuk menanggapi pertanyaan audien

### Penutup

Bagian penutup diskusi kelas meliputi a) moderator menyimpulkan dan merefeksi hasil diskusi; b) evaluasi pelaksanaan diskusi, memberi kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan evaluasi pelaksanaan diskusi demi kebaikan diskusi selanjutnya; c) dosen memberikan umpan balik dan penguatan; d) dosen mengingatkan pelaksanaan diskusi berikutnya kepada calon-calon kelompok penyaji agar mempersiapkan diri lebih awal dan lebih baik

### Kerangka Berfikir



## Hipotesis Tindakan

Untuk memberikan jawaban sementara berdasarkan kerangka berfikir yang telah dirumuskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Penggunaan model pembelajaran diskusi kelas dapat meningkatkan sikap demokrasi pokok bahasan transformasi nilai-nilai demokrasi mahasiswa.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2012/2013 dengan lokasi penelitian di semester II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Peneliti mengambil lokasi penelitian di semester II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto karena banyak mahasiswa pada tahun yang lalu pada kompetensi dasar Transformasi Nilai-nilai Demokrasi yang rata-rata sikap demokratisnya masih rendah.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk sampel diambil berdasarkan pada tujuan tertentu atau disebut juga dengan sampel bertujuan/purposive sampel. Pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh, artinya semua populasi diteliti semua.

Untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, antara lain:

### 1. Angket atau kuisioner (*Quesionaire*)

Manfaat dari metode ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang nilai-nilai Demokrasi mahasiswa Semester II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap penggunaan model pembelajaran *Diskusi Kelas* pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dari jenis-jenis angket di atas, peneliti mengambil angket jenis tertutup dengan membubuhkan tanda *check list* (✓) pada kolom yang sudah tersedia dan sudah terdapat nilai dari masing-masing kolom yaitu dari nilai 4, 3, 2, 1, 0. Adapun rincian dari alternatif jawaban dan nilai sebagai berikut:

Skor pernyataan positif: sering kali = 4; agak sering = 3; beberapa kali = 2; sesekali = 1; tidak pernah = 0

Skor pernyataan positif: sering kali = 0; agak sering = 1; beberapa kali = 2; sesekali = 3; tidak pernah = 4'

### 2. Observasi

Observasi yang digunakan adalah *Category System* yaitu pengamatan yang membatasi pada sejumlah variabel, misalnya pengamat ingin mengetahui keaktifan atau partisipasi murid dalam proses belajar mengajar. Pengamat hanya memperhatikan kejadian-

kejadian yang masuk kedalam kategori keaktifan atau partisipasi murid. Pengamat tidak memperhatikan variabel yang terlalu banyak.

## Metode Analisis Data

Untuk menghitung hasil pengamatan dan kuis yang terjadi pada setiap siklusnya peneliti digunakan analisis prosentase. Keuntungan menggunakan analisis prosentase sebagai alat untuk menguji informasi adalah bahwa pembaca akan mengetahui tingkat sumbangan tiap-tiap aspek dalam keseluruhan konteks permasalahan yang sedang dibicarakan. Adapun perhitungan presentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase \%} = \frac{\text{Frekuensi}}{N} \times 100\%$$

(Singarimbun, 1987: 248)

F = Frekuensi yang sedang dicari prosentase.

N = Jumlah seluruh responden.

P = Angka prosentase.

Untuk menganalisis data perindikator dan secara keseluruhan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase \%} = \frac{n}{N} \times 100\%$$

(Ali, 1985:184)

n = Jumlah nilai total jawaban

N = Jumlah seluruh nilai diperoleh dari seluruh responden × jumlah alternatif jawaban × jumlah seluruh item soal

% = Prosentase

Penafsiran hasil keseluruhan di atas adalah

Baik = 76-100%

Cukup = 56-75%

Kurang Baik = 40-55%

Tidak Baik = kurang dari 40%

(Arikunto, 1998:246)

## Rencana Tindakan

### Planning (rencana)

Rencana merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dosen sebelum melakukan sesuatu. Diharapkan rencana tersebut berpandangan kedepan, serta fleksibel untuk menerima efek-efek yang tak terduga dan dengan rencana tersebut secara dini kita dapat mengatasi hambatan. Dengan perencanaan yang baik seorang praktisi akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan dan mendorong para praktisi tersebut untuk bertindak dengan lebih efektif. Sebagai bagian dari perencanaan partisipan harus bekerja sama dalam diskusi untuk membangun suatu kesamaan bahasa dalam menganalisis dan memperbaiki pengertian maupun tindakan mereka dalam situasi tertentu.

### Action (tindakan)

Tindakan ini merupakan penerapan dari perencanaan yang telah dibuat yang dapat berupa suatu penerapan model pembelajaran tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan model yang sedang dijalankan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu model pembelajaran yang hasilnya juga akan dipergunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas

### Obsevation (Pengamatan)

Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengamatan, hal-hal yang perlu dicatat oleh peneliti adalah proses dari tindakan, efek-efek tindakan, lingkungan dan hambatan yang muncul.

### Reflection (refleksi)

Refleksi di sini meliputi: analisis, sintesis, penafsiran, menjelaskan dan menyimpulkan. Hasil dari refleksi adalah diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, dipergunakan untuk memperbaiki kinerja dosen pada pertemuan selanjutnya. Dengan demikian, penelitian tindakan tidak dapat dilaksanakan dalam sekali pertemuan karena hasil refleksi membutuhkan waktu untuk melakukannya sebagai planning untuk siklus selanjutnya.

## Deskripsi Hasil Penelitian Pra Tindakan Kelas

### Hasil Angket Siklus I

Hasil angket siklus I seperti tabel di bawah ini

Tabel 1 Hasil angket siklus I

No	Nilai	No	Nilai	No	Nilai	No	Nilai
1	-	9	168	17	182	25	185
2	-	10	176	18	180	26	170
3	-	11	187	19	165	27	170
4	-	12	-	20	186	28	149
5	180	13	171	21	-	29	179
6	166	14	178	22	165		
7	-	15	187	23	173		
8	187	16	-	24	192	Jml	3696

Berdasarkan hasil angket tersebut, nilai demokratis mahasiswa pada siklus I adalah 88,00.

### Observasi

Hasil observasi keaktifan mahasiswa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Observasi Keaktifan Mahasiswa Siklus I

No	Kriteria Keaktifan mahasiswa	Siklus I	
		Jumlah	(%)
1	Siap menerima kuliah Pendidikan Pancasila	13	65
2	Menyiapkan buku Pendidikan Pancasila dan catatan	11	55
3	Memperhatikan penjelasan dosen	14	70
4	Mencatat materi penting dari dosen	12	60
5	Menanyakan materi yang kurang jelas	2	10
6	Mengajukan pertanyaan kepada dosen	2	10
7	Berusaha dapat menjawab pertanyaan dosen	5	25
8	Duduk sesuai kelompok masing-masing	17	85
9	Mengikuti diskusi kelompok dengan baik	9	45
10	Dapat menyelesaikan tugas individu	12	60
11	Mengerjakan tugas kelompok dengan baik	10	50
12	Mampu bertanding secara sportif dengan kelompok lain	11	55
13	Mampu menanggapi tanggapan kelompok lain	7	35
14	Memperhatikan hasil diskusi kelompok lain	12	60
15	Berupaya berpartisipasi aktif dalam diskusi	13	65
16	Memberikan masukan pada saat diskusi	4	20
17	Mempunyai perhatian penuh dalam diskusi	13	65
18	Memberikan kesempatan kepada teman lain	17	85
19	Ikut menjaga suasana tertib dalam diskusi	15	75
20	Merangkum hasil diskusi	10	50
	Rata-rata	Jml	52,52

Ket. Jumlah mahasiswa yang hadir 20 dari 29 mahasiswa

### Pelaksanaan Tindakan Siklus II

### Hasil Angket Siklus II

Hasil angket Siklus II seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3 Hasil Angket Siklus II

No	Nilai	No	Nilai	No	Nilai	No	Nilai
1	-	9	178	17	194	25	193
2	-	10	195	18	181	26	183
3	-	11	193	19	178	27	172
4	-	12	-	20	182	28	159
5	187	13	182	21	-	29	186
6	172	14	179	22	184		
7	-	15	194	23	189		
8	189	16	-	24	192	Jml	3862

Berdasarkan hasil angket tersebut, nilai sikap demokratis mahasiswa pada siklus II adalah 91,95. Hasil observasi keaktifan mahasiswa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Observasi Keaktifan Mahasiswa Siklus II

No	Kriteria Keaktifan mahasiswa	Siklus II	
		Jumlah	(%)
1	Siap menerima kuliah Pendidikan Pancasila	18	90
2	Menyiapkan buku Pendidikan Pancasila dan catatan	16	80
3	Memperhatikan penjelasan dosen	19	95
4	Mencatat materi penting dari dosen	16	80
5	Menanyakan materi yang kurang jelas	3	15
6	Mengajukan pertanyaan kepada dosen	2	10
7	Berusaha dapat menjawab pertanyaan dosen	8	40
8	Duduk sesuai kelompok masing-masing	19	95
9	Mengikuti diskusi kelompok dengan baik	12	60
10	Dapat menyelesaikan tugas individu	10	50
11	Mengerjakan tugas kelompok dengan baik	16	80
12	Mampu bertanding secara sportif dengan kelompok lain	12	60
13	Mampu menanggapi tanggapan kelompok lain	10	50
14	Memperhatikan hasil diskusi kelompok lain	18	90
15	Berupaya berpartisipasi aktif dalam diskusi	14	70
16	Memberikan masukan pada saat diskusi	3	15
17	Mempunyai perhatian penuh dalam diskusi	16	80
18	Memberikan kesempatan kepada teman lain	17	85
19	Ikut menjaga suasana tertib dalam diskusi	13	65
20	Merangkum hasil diskusi	12	60
	Rata-rata		62

Ket. Jumlah Mahasiswa yang hadir 20 dari 29 mahasiswa

Pada siklus II juga dilakukan pos-test untuk mengetahui kemampuan akhir mahasiswa setelah proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe diskusi di Semester II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dengan hasil skor rata-rata cenderung mengalami peningkatan baik dibandingkan dengan skor rata-rata pos-test siklus I maupun dengan skor rata-rata pre-test siklus II. Hasil pretes dan posttes pada siklus II sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5 Nilai Rata-rata Pretest dan Posttest Siklus II

Jumlah mahasiswa	Nilai rata-rata	
	Pre-test	Post-test
20	51,35	80,36

Berdasarkan hasil analisis rata-rata angket sikap demokratis Pendidikan Pancasila dari siklus I dan II diketahui, bahwa model pembelajaran kooperatif tipe diskusi dapat meningkatkan rasa demokratis mahasiswa materi Kewarganegaraan dalam konteks Kewarganegaraan Republik Indonesia mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hasil analisis rata-rata angket sikap demokratis mahasiswa semester II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada siklus I adalah 88, dan siklus II: 91,95

## Pembahasan

Model pembelajaran kooperatif tipe diskusi dapat meningkatkan sikap demokratis karena model ini merupakan suatu model pembelajaran yang mengacu pada model pengajaran yang mengharuskan mahasiswa bekerja sama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar. Model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap mahasiswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Di samping itu, bahwa tujuan pembelajaran kooperatif yang menerapkan sistem kompetisi, adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya, bukan oleh individu-individu lainnya.

Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah juga penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain. Di samping itu, pembelajaran kooperatif mengajarkan kepada mahasiswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi.

Model pembelajaran kooperatif diskusi juga memperbaiki prestasi mahasiswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya, model ini unggul dalam membantu mahasiswa memahami konsep-konsep sulit. Model ini juga menunjukkan bahwa struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai peserta didik pada belajar akademik. Model pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada peserta didik kelompok bawah maupun kelompok

pok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik.

Model pembelajaran ini juga sangat memungkinkan mahasiswa dapat menelaah sebuah mata kuliah atau pokok bahasan bebas mengaktualisasikan diri dengan seluruh potensi yang ada dalam diri mahasiswa tersebut dapat keluar, selain itu kerja sama antar mahasiswa juga mahasiswa dengan dosen akan membuat interaksi belajar dalam kelas menjadi hidup dan tidak membosankan mahasiswa.

Model pembelajaran kooperatif ini mengutamakan kerja kelompok dan kemampuan menyatukan intelegensi mahasiswa yang berbeda-beda akan dapat membuat siswa mempunyai nilai dalam segi kognitif, afektif dan psikomotor secara merata satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Dengan model yang mengutamakan kerja kelompok dan kemampuan menyatukan intelegensi mahasiswa yang berbeda-beda akan dapat membuat mahasiswa mempunyai nilai dalam segi kognitif, afektif dan psikomotor secara merata satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain.

Ada beberapa kelebihan metode diskusi (kelas maupun kelompok, antara lain (1) memungkinkan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, juga antara mahasiswa dengan mahasiswa; (2) dosen dapat membca pikiran mahasiswa tentang konsep yang baru dipelajarinya, seperti menilai pemahaman mereka apakah mereka salah mengerti atau bias terhadap konsep baru tersebut (Budiardjo, 1997:8-17). Metode diskusi menurut menurut Semiawan, dkk (1988: 76) juga memiliki keuntungan: (1) mempertinggi peran serta secara perorangan; (2) mempertinggi peran serta kelas secara keseluruhan; (3) memupuk sikap saling menghargai pendapat orang lain.

Menurut Suryosubroto (2002:185) keuntungan metode diskusi cukup banyak, yakni (1) melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar; (2) setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing; (3) dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah; (4) dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya adalah diskusi diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan akan (kemampuan) diri sendiri; (5) dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokratis para siswa.

Metode diskusi dalam proses pembelajaran menurut Kasmadi (1990:106) mempunyai maksud (1) melibatkan murid sebagai bagian komponen sistem; (2) menstimulasi dan memotivasi murid; (3) melatih mereka agar kritis dalam menganalisa; dan (4) mengembangkan kemampuan bekerja sama.

## Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) sikap demokratis mahasiswa Semester II

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto baik; 2) model pembelajaran kooperatif tipe diskusi dapat meningkatkan sikap nasionalisme pokok bahasan Transformasi Nilai-nilai Demokrasi semester II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi; Suhardjono; dan Supardi. (2007). *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas. (1999). *Penelitian Tindakan Action Research*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
- Depdiknas. (2005). *Pedoman Penyusunan Usulan dan Lporan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*. Jakarta : Ditjen Dikti Depdiknas.
- Depdiknas. (2007). *Pengembangan Inovasi Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan Ditjendikti, Departemen Pendidikan Nasional.
- Hopkins, David. (1993). *A Teacher's Guide to Clasroom Research*. Philadelphia: Open University Press.
- Kunandar. (2008). *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Dosen*. Jakarta: Raja Grafindi Persada.
- Lewin, Kurt. (1990) *Action Researchand Minority Problems The Action Research Reader*, Victoria : Deakin University.
- LP3 Unnes Semarang. (2007). *Bahan Ajar Pengembangan Profesionalitas Dosen*. Semarang: LP3 UNNES Semarang.
- Mulyasa E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Dosen*, Bandung Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa E. (2009). *Praktik Penelitian Tindakan Kelas Menciptakan Perbaikan berkesinambungan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukidin, Basrowi dan Suranto. (2002). *Manajemen Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Insan Cendikia.
- Suparno, Paul. (2004). *Dosen Demokratis di Era Reformasi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo
- Suyanto. (2005). *Profesionalisasi dan Sertifikasi Dosen*, makalah dalam seminar PGRI di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Desember 2005.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional

Wardani; Kuswaya Wihardit dan Noehi Nasution.  
(2002). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta:  
Universitas Terbuka.

Wibawa, Basuki. (2004). *Penelitian Tindakan Kelas*.  
Jakarta: Dirjen Dikdasmen Departemen  
Pendidikan Nasional.

Wiriaatmadja, Rachiat. (2006). *Metode Penelitian  
Tindakan Kelas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya